



# DISKOMINFO



Rancangan Akhir

# RENJA

Rencana Kerja

# 2024

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang



[kominfo@batangkab.go.id](mailto:kominfo@batangkab.go.id)



[@kominfobatang](https://www.instagram.com/kominfobatang)



[kominfo.batangkab.go.id](https://kominfo.batangkab.go.id)



RANCANGAN AKHIR  
**RENCANA KERJA**  
**(RENJA)**  
**TAHUN 2024**  
**(HASIL REVIU)**



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BATANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Tahun 2024 telah selesai disusun sebagaimana dengan berdasarkan Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Tahun 2023 – 2026, maka disusunlah Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Batang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Tahun 2024.

Batang, 19 Juni 2023

Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Batang,



TRIOSSY JUNIARTO, S.I.P, MM  
Pembina Tk.I  
NIP. 19690621 19903 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL ..... iv

DAFTAR GAMBAR ..... v

**BAB 1        PENDAHULUAN .....1-1**

    1.1        Latar Belakang..... 1-1

    1.2        Landasan Hukum..... 1-1

    1.3        Maksud dan Tujuan ..... 1-2

    1.4        Sistematika Penulisan..... 1-3

**BAB 2        HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU2-1**

    2.1        Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian  
              Renstra Perangkat Daerah .....2-1

    2.2        Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....2-1

    2.3        Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD                2-15

    2.4        Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....2-15

**BAB 3        TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....3-16**

    3.1        Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....3-16

    3.2        Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....3-18

    3.3        Program dan Kegiatan .....3-15

**BAB 4        RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..4-1**

**BAB 5        PENUTUP .....5-8**





**DAFTAR TABEL**

Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023..... 2-3

Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 2-1

Tabel 2-3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 ..... 2-15

Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Batang..... 3-15

Tabel 4-1 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.....3-15



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah .....2-17

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian *tujuan (comon goals)* dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan RKPD Tahun 2023 dan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Tahun 2023 - 2026.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Kominfo Kabupaten Batang Tahun 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50/3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana



Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Bupati Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
22. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 36).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan Renja Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 mempunyai tujuan dan maksud, antara lain:

#### 1. Tujuan

- a. Memberikan arahan, acuan dan pedoman bagi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.
- b. Menjadi dasar koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam mencapai tujuan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan;
- c. Menjadi dasar pengendalian (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2024.

#### 2. Maksud

- a. Menterjemahkan Resntra Dinas Kominfo dalam dokumen perencanaan tahunan.
- b. Implementasi tugas dan fungsi serta mandat lainnya di Dinas Kominfo untuk pelaksanaan tahun 2024

1.4 Sistematika Penulisan

I. BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sub Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2. Landasan Hukum

Sub Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang;

1.3. Maksud dan Tujuan

Sub Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang;

1.4. Sistematika Penulisan

Sub Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang serta susunan garis besar isi dokumen.

II. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat review kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD Sub Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang tahun 2022 dan realisasi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sub Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan komunikasi dan informatika Kabupaten Batang berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

2.3. Isu- isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Sub Bagian ini menguraikan proses pembandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut.

**2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Sub Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan dari masyarakat.

**2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sub Bagian ini menjelaskan proses perencanaan

**III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BATANG**

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran program dan kegiatan yang telah direncanakan.

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sub Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang

**3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Sub Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang.

**IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Dalam bab ini menguraikan program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Tahun 2024

**V. PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah, oleh karena itu dengan demikian perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja OPD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Dan hasil evaluasi tersebut merupakan bahan pertimbangan kebijakan di tahun berikutnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang tahun 2022, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:**
- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**
- Kegiatan :  
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Sub Kegiatan :  
*Penyediaan Jasa Surat Menyurat ,*  
Sub kegiatan ini dalam tahun anggaran 2023 tidak terealisasi 100% dari target yang ditentukan hanya terealisasi 98% atau dari target 900 lembar terealisasi sebanyak 898 lembar karena dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan kebutuhan.
- b. **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**
- Kegiatan :  
Pengelolaan E-Government di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1. Sub Kegiatan :  
*Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik*



Pada sub kegiatan ini capaian kinerja sebesar 95,29% dari target yang ditentukan sebesar 100%. Capaian kinerja ditunjukkan dengan besarnya nilai indeks SPBE yang dikeluarkan oleh Kementrian PAN-RB, target Diskominfo Kabupaten Batang pada tahun 2023 menargetkan mendapat nilai indeks SPBE sebesar 3,4 dan hasil evaluasinya keluar nilai indeks SPBE sebesar 3,24. Tidak bisa mencapai target yang ditentukan karena adanya indikator baru dalam system penilaian yang ditentukan oleh Kementrian PAN-RB, indikator system elektronik tersebut belum bisa diimplementasikan di Kabupaten Batang.

2) **Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:**

a. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**

- *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
  - Sub Kegiatannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD telah mencapai target 100%.
- *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
  - Sub Kegiatannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN telah mencapai target 100% karena sub kegiatan tersebut terkait dengan pemenuhan gaji dan tunjangan yang wajib diadakan sesuai dengan peraturan.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN telah mencapai target 100% karena sub kegiatan tersebut terkait dengan honor-honor pengelola keuangan yang harus diberikan kepada ASN petugas pengelola keuangan SKPD.
- *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*
  - Sub Kegiatannya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor telah mencapai target 100%
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan telah mencapai target 100%
  - Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan telah mencapai target 100%, karena buku-buku regulasi baru harus tersedia untuk kelancaran tugas di Diskominfo Kab. Batang.
- *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik telah mencapai target 100% karena setiap bulan tagihan rekening listrik dan air PDAM serta pembayaran Benwith (jasa telekomunikasi) telah terbayarkan sesuai dengan besar tagihannya setiap bulan selama 12 bulan sesuai target yang ditetapkan.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor telah mencapai target 100%, sub kegiatan ini terkait dengan pemenuhan honor petugas kebersihan dan penyediaan peralatan/perlengkapan kebersihan kantor selama satu tahun.
- *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan telah memenuhi target 100%, semua kendaraan dinas telah terbayar pajaknya selama setahun dan pemeliharaan dilakukan rutin selama 12 bulan.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya telah mencapai target 100%
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya telah mencapai target 100%. Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk pemeliharaan/rehab gedung studio abirawa dan ruang podcast.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya telah mencapai target 100%.
- b. Program Informasi dan Komunikasi Publik**
- *Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota*
- Sub Kegiatan Pengelolaan media komunikasi public, telah mencapai target 100%.
- Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, telah mencapai target 100%
- Penyelenggaraan hubungan masyarakat , media dan kemitraan komunitas, telah mencapai target 100%
- c. Program Aplikasi Informatika**
- *Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota*
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan system jaringan intra Pemerintah Daerah telah mencapai 100% , Kabupaten Batang pada tahun 2022 telah mencapai 125 titik jaringan sesuai dengan target yang ditentukan.
- *Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Batang*
- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas, telah mencapai target 100%, di Kabupaten Batang tercatat ada 239 desa dan pada tahun 2022 desa yang telah menerapkan

smart village 239 desa.

**d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

- *Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota*
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, telah mencapai target 100%.
- Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur, telah mencapai target 100%
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi, telah mencapai 100%.

**2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

- *Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah*
- Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dengan target 100% pada tahun 2022 telah tercapai.

**3) Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :**

**a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

- *Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota*
- Sub Kegiatan Membangun Metadata statistik sektoral, khusus pada pelaksanaan Open data telah mencapai 103% karena kegiatan pengumpulan data yang biasanya dilakukan pada akhir semester sekarang dilakukan pada awal semester, sehingga data yang terkumpul bisa langsung diolah dan di publikasikan ke Portal Open Data.

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Diskominfo Kabupaten Batang Tahun 2022 dan capaian renstra Diskominfo Kabupaten Batang dapat dilihat pada tabel 2.1 (Tabel TC-29) , berikut di bawah ini:

Tabel 2.1 (T-C.29)  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah  
dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)  
Diskominfo Kabupaten Batang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD s/d Tahun Lalu (n-3) Th. 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja perangkat daerah Tahun 2023 *(n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun berjalan/ n-1)	
									Target Tahun 2022 *(n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 *(n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian s/d tahun 2023 *(n-1)	Perkiraan Tingkat Capaian (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10	11=(10/4)*100
<b>2</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN YANG WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
<b>2</b>	<b>16</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>									
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b> Indikator : Tingkat konsistensi kegiatan Renja PD terhadap Renstra									
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>		<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya kesesuaian laporan kinerja dengan realisasi kegiatan bidang-bidang								
2	16	01	2.01	06	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKjIP, LPPD,LAKIP,RKA dan DPA OPD	100 % (48 lap)	12 lap	12 lap	12 lap	100 %	12 lap	12 lap	25 %

2	16	01	2.02		<b>Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran Administrasi Keuangan PD								
2	16	01	2.02	01	<i>Sub Kegiatan :</i> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	01	2.02	02	2. Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	Tersedianya operasional pengelolaan keuangan OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	16	01	2.06		<b>Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya pelayanan rutin administrasi umum PD								
2	16	01	2.06	01	<i>Sub Kegiatan :</i> 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	100% (200 buah)	100% (250 buah)	50 buah	50 buah	100%	50 buah	50 buah	25 %
2	16	01	2.06	02	2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100% ( 20 paket)	100% (12 paket)	(4 paket)	(4 paket)	100%	4 paket	4 paket	20 %



2	16	01	2.06	04	3. Penyediaan bahan logistic kantor	Tersedianya makanan dan minuman kantor	100% (6300 kali)	100% (2520 kali)	1260 kali	1260 kali	100%	1260 kali	5040 kali	100 %
2	16	01	2.06	05	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100% (48 bulan)	100% (60 bulan)	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	25 %
2	16	01	2.06	06	5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhi bacaan dan peraturan perundang-undangan	48 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	25 %
2	16	01	2.06	09	6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya dana operasional perjalanan dinas	48 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	25 %
2	16	01	2.07		<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya kelengkapan barang PD untuk memperlancar kinerja PD	100%	100%	0	0	0	0	0	0
2	16	01	2.07	05	<i>Sub Kegiatan:</i> 1. Pengadaan Mebel	Terpenuhinya kebutuhan mebel kantor	100%	100%	0	0	0	0	0	0

2	16	01	2.07	11	2. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	100% (4 kali)	100% (4 kali)	1	1	100%	0	0	0
2	16	01	2.08		<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta layanan umum kantor	100% (48 bulan)	100% (60 bulan)	100% (12 bulan)	100% (12bulan )	100%	100% (12bulan)	12 bulan	25 %
2	16	01	2.08	01	<i>Sub Kegiatan :</i> 1. Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya peranko , materai dan jasa pos lainnya untuk kelancaran kedinasan	100% (3600 lembar)	4500 lembar	900 lembar	898 lembar	98%	900 lembar	900 lembar	25 %
2	16	01	2.08	02	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa telekomunikasi , sumber daya air dan listrik	48 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	25 %
2	16	01	2.08	03	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honorarium petugas kebersihan kantor, tenaga administrasi dan peralatan/perlengkapan kebersihan kantor	48 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	25 %

2	16	01	2.09		<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya keamanan, kelancaran fasilitas transportasi dan gedung dalam proses kinerja PD								
2	16	01	2.09	01	<i>Sub Kegiatan :</i> 1. Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas, tersedianya dana untuk perijinan/pajak kendaraandinas	240 kali	160 kali	60 kali	60 kali	100%	60 kali	60 kali	25 %
2	16	01	2.09	06	2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	48 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	25 %
2	16	01	2.09	09	3. Pemelihraan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	4 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	25 %
2	16	01	2.09	11	4. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	48 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	25 %
2	16	02			<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b> Indikator : Meningkatkan pengembangan komunikasi, informasi dan media serta kerjasama informasi dengan mas media									
2	16	02	2.01		<b>Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota</b>	Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan Kabupaten Batang	48 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	25 %

2	16	02	2.01	05	Sub Kegiatan : Pengelolaan media komunikasi publik	Terlaksananya pengelolaan dan penyajian informasi melalui media komunikasi publik	48 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	25 %
2	16	02	2.01	06	Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik	Terlaksananya pelayanan informasi publik	48 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	25 %
2	16	02	2.01	12	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Terselenggaranya kegiatan kehumasan dan kemitraan komunitas	48 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	25 %
					Sub Kegiatan : Layanan Hubungan Media	Tersebaranya berita kabupaten Batang	5200 berita	3900 berita	1300	1300	100%	1300	1300	25 %
2	16	03			<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b> Indikator : Meningkatnya infrastruktur dan tata kelola TIK daerah									
2	16	03	2.01		<b>Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yg telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terpenuhinya infrastruktur jaringan TIK								
2	16	03	2.01	03	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan system jaringan intra Pemerintah Daerah	Jumlah Titik Jaringan	130 titik	120 titik	5 titik	5 titik	100%	5 titik	125 titik	96%
2	16	03	2.02		<b>Kegiatan : Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Tercapainya target capaian indeks SPBE dan Smart City								
2	16	03	2.02	07	Sub Kegiatan : Pengembangan Aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Tercapainya indeks SPBE	Skor PeGi 3,41	Skor PeGi 3,41	3,4	3,24	95,29 %	3,4	3,4	100%
2	16	03	2.02	09	Sub Kegiatan : Pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten / Kota cerdas dan kota cerdas	Jumlah system unggulan smart city	25 sistem	20 sistem	5 sistem	5 sistem	100%	5 sistem	5 sistem	20 %
						Jumlah desa yang menerapkan smart village	239 desa	100 desa	50 desa	50 desa	100%	50 desa	50 desa	20 %

[illegible]



[illegible]

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Tahun 2023-2026. Tabel 2-2 (T-C.30) merupakan Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Batang khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika.

Program/kegiatan/sub kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang tahun 2022 sebagian besar merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021, serta sebagian lagi merupakan kegiatan baru yang dilaksanakan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Batang sekaligus sebagai wujud pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika diberi tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian di wilayah Kabupaten Batang.

Selanjutnya, sebagai alat pengukuran kinerja pelayanan PD disampaikan IKU (indicator kinerja utama) yang diambilkan dari target Renstra yang terangkum dalam Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2 (Tabel T-C.30) berikut ini:

Tabel 2.2 ( Tabel T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 2022	Tahun n-1 2023	Tahun n 2024	Tahun n+1 2025	Tahun n-2 2022	Tahun n-1 2023	Tahun n 2024	Tahun n+1 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>16.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>											
16.1	Jumlah jaringan komunikasi			110	115	120	130	110	115	120	130	Jumlah jaringan komunikasi di Kabupaten Batang diproyeksikan telah mencapai 130 titik pada akhir Th.2021
16.2	Web site milik pemerintah daerah			65 buah	65 buah	65 buah	65 buah	65 buah	65 buah	65 buah	65 buah	Website milik pmda yang aktif sudah mencapai 65 website pd th.2022
16.3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan			78	78	78	78	78	78	78	78	Di Kabupaten Batang ada 41 kelompok informasi masyarakat yang dibina setiap tahunnya.
16.4	Skor PeGi (Pemeringkatan SPBE)			3.24	3,4	3,5	3,55	3,24	3,4	3,4	3,5	Capaian skor PeGi (indeks SPBE Th.2021 turun tdk sesuai target krn ada indikator penilaian baru

[illegible]

### 1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka pengembangan e-government Pemerintah Kabupaten Batang masih mengalami beberapa tantangan, diantaranya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Selain itu Pemerintah Kabupaten Batang juga dituntut untuk memberikan akses informasi ke masyarakat tanpa terkecuali. Kondisi demikian mengharuskan setiap Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Batang menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat, dengan memperhatikan batasan sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Semangat meningkatkan pelayanan publik selaras dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa dimana dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, Badan Publik wajib menyelenggarakan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki kewenangan dalam penyediaan informasi publik yang berkualitas. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi baik keluhan ataupun masukan kepada Pemerintah Kabupaten Batang melalui aplikasi E-Lapor Bupati. Selain itu aplikasi ini mampu berperan sebagai sarana dalam menjembatani masyarakat dan pemerintah dalam komunikasi pelayanan pengaduan masyarakat. E-Lapor Bupati juga telah diintegrasikan dengan Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Whistle Blowing System (WBS). Keluhan masyarakat merupakan salah satu bentuk aspirasi yang cukup menjadi fokus pelayanan publik saat ini. Masukan dan keluhan masyarakat dapat dijadikan bahan evaluasi dalam peningkatan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Batang. Selain melalui aplikasi E-lapor Bupati, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui media sosial, email atau telepon. Kabupaten Batang telah mempunyai tim CSIRT yang bertanggungjawab terhadap keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Batang. Tim ini terdiri dari beberapa shecholder antara lain, Kabupaten/kota, Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan.

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi setiap tahunnya selalu dievaluasi oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melalui Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Eletronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk



memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dievaluasi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Aspek penilaian dalam SPBE meliputi domain kebijakan (aspek kebijakan tata kelola dan aspek kebijakan pelayanan), domain tata kelola (aspek kelembagaan, aspek strategi dan perencanaan dan aspek TIK) dan domain layanan (aspek administrasi pemerintah dan aspek pelayanan publik). Pemanfaatan TIK dalam Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi infrastruktur jaringan, aplikasi dan keamanan informasi.

Perkembangan teknologi dan trend pemanfaatan teknologi pada penyediaan layanan publik, menuntut peran pemerintah yang tidak hanya sebagai penyedia layanan namun juga sebagai fasilitator yang berfungsi untuk menjembatani semua stakeholder dalam berkontribusi untuk mewujudkan pembangunan daerah. Meskipun pemanfaatan teknologi sudah begitu maju, seringkali masih ditemui adanya gap yang terjadi antara kebutuhan masyarakat dengan fasilitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Dibutuhkan Big Data untuk mendukung peningkatan layanan publik kepada masyarakat. Perencanaan, penganggaran, investasi dan implementasi TIK untuk mendukung pelayanan publik harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penggunaan Big Data untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat sangat diperlukan sehingga pelayanan publik kepada masyarakat lebih maksimal.

Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Batang telah membentuk Call Center 112 yang merupakan sarana untuk pelayanan publik terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat yang membutuhkan bantuan, sehingga masyarakat cepat mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Untuk saat pandemic covid 19, lebih banyak dipergunakan untuk memfasilitasi video conference dari berbagai lintas OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang yang akan melakukan aktivitas secara daring dengan jumlah peserta yang banyak.

Dengan supporting Teknologi Informasi diharapkan peran aktif masyarakat untuk memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Peran masyarakat saat ini yang tidak hanya berperan sebagai obyek pembangunan tetapi juga berperan menjadi subyek pembangunan perlu mendapatkan ruang terutama dalam melakukan usulan terhadap pembangunan di wilayahnya maupun monitoring terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah Kabupaten Batang telah mendistribusikan bandwidth yang tersebar di 239 desa serta 9 kelurahan di wilayah Kabupaten Batang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pembelajaran secara daring dalam pandemic covid-19. Pemerintah Daerah juga menyediakan berbagai fasilitas dan sarana penunjang seperti penyediaan WiFi gratis di beberapa lokasi wisata dan lokasi UMKM di wilayah Kabupaten Batang. Diharapkan dengan adanya wifi gratis dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk penjualan produk melalui online dalam masa pandemic covid 19.

Maraknya terorisme dan isu-isu yang tidak benar (hoax) di masyarakat merupakan ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Ideologi teroris tersebut membuat masyarakat tidak aman dan nyaman. Ideologi Pancasila sebagai pilar bangsa Indonesia yang menjadi petunjuk, pandangan hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila mempunyai nilai-nilai luhur yang komprehensif. Mulai lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat memicu tumbuh suburnya terorisme di Indonesia. Diperlukan literasi informasi tentang penanaman dan pemahaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat untuk meminimalisir terorisme dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang sebagai sebuah Perangkat Daerah yang berfungsi untuk melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Komunikasi dan Informatika dan di Bidang Persandian serta Statistik memiliki isu strategis sebagai berikut:

1. Melaksanakan keterbukaan informasi publik bagi semua Badan Publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Batang sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang akuntabel
2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam seluruh pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. SPBE merupakan salah satu komponen dalam Reformasi Birokrasi.
3. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data terpadu dan terintegrasi sebagai suatu wujud kesatuan data pembangunan untuk mendukung peningkatan layanan publik.
4. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk mendukung pelayanan publik yang efektif, transparan dan akuntabel serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Batang dalam hal yang positif.
5. Melaksanakan literasi informasi kepada masyarakat melalui berbagai media informasi guna mencegah terjadinya penyebaran informasi yang tidak benar (hoax) yang dapat meresahkan dan memecah kesatuan bangsa Indonesia.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi diantaranya adalah :

1. Minimnya infrastruktur dan sumberdaya di bidang teknologi informasi dan computer (TIK) dalam rangka implementasi system pelayanan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
2. Belum adanya sistem tunggal layanan Egovernment yang unggul dan terintegrasi;
3. Belum optimalnya pemberitaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada mass media dan media online;
4. Masih terdapatnya wilayah *blank spot* yang belum terlayani akses informasi.
5. System Keamanan Informasi yang belum maksimal

Dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja dan pelayanan masyarakat serta untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa yang akan datang diperlukan langkah kebijakan teknis/operasional guna mencapai tujuan pembangunan sehingga RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 dapat dilaksanakan. Langkah-langkah strategis yang perlu diupayakan antara lain adalah :

1. Mendorong efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dengan memaksimalkan keluaran dan hasil (output dan outcome) dengan masukan

(input) yang tersedia. Program dan kegiatan diarahkan untuk memecahkan isu dan masalah strategis yang dihadapi;

2. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dengan terus meningkatkan kualitas baik sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarananya;
3. Memaksimalkan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi agar semua program/kegiatan/sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik.



1.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 tidak mengalami perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD 2024. Hal ini dikarenakan sifat tupoksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika banyak yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tupoksi dan anggaran yang sudah jelas. Namun demikian untuk Perencanaan Anggaran Tahun 2024 lebih memaksimalkan dan meningkatkan peran Dinas dan hal pengelolaan Komunikasi dan Informatika ada beberapa kegiatan tambahan maupun kegiatan lanjutan yang pada tahun 2024 yang memerlukan tambahan anggaran untuk optimalisasi kegiatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah :

- 1. Pemeliharaan Jaringan Komunikasi internal Pemkab. Batang
- 2. Monitoring dan Evaluasi SPBE Tahun 2023
- 3. Penyelenggaraan Call Center 112
- 4. Monitoring dan Evaluasi Smart City Tahun 2023
- 5. Pengembangan Aplikasi Artificial Intelligence
- 6. Penyelenggaraan Smart Village Tahun Ke 5
- 7. Penyelenggaraan Keamanan Informasi, Persandian dan Telekomunikasi
- 8. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
- 9. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 10. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota khususnya Kabupaten Batang.
- 11. Penyelenggaraan gerakan Satu Data Indonesia

KABUPATEN BATANG

[illegible]

		<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya sarpras penunjang kelancaran administrasi perkantoran</b>	<b>paket</b>	<b>1</b>	<b>227.717.050,-</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Diskominfo	<b>Tersedianya sarpras penunjang kelancaran administrasi perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>227.717.050,-</b>	Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sdh disesuaikan dg kebutuhan yg diperlukan.
		- Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene- rangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	paket	1	7.000.000,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor	Diskominfo	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	7.000.000	
		- Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	paket	1	43.379.550,-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Diskominfo	Tersedianya alat tulis kantor	1	43.379.550,-	
		- Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman untuk kantor	paket	1	73.608.000,-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskominfo	Tersedianya makanan dan minuman untuk kantor	1	73.608.000,-	
		- Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	paket	1	19.577.500,-	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Diskominfo	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1	19.577.500,-	
		- Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	dokume n	5	6.000.000,-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Diskominfo	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	5	6.000.000,-	
		- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya dana operasional perjalanan dinas	laporan	50	78.152.000,-	Penyelengg aaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	Tersedianya dana operasional perjalanan dinas	50	78.152.000,-	
		<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan sarpras gedung kantor yang menunjang kinerja aparatur</b>	<b>unit</b>	<b>1</b>	<b>7.366.600,-</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Diskominfo	<b>Terpenuhinya kebutuhan sarpras gedung kantor yang menunjang kinerja aparatur</b>	<b>1</b>	<b>7.366.600,-</b>	Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sdh disesuaikan dg kebutuhan yg diperlukan.
		- Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Terpenuhinya kebutuhan mebeleur kantor	0	0	0	Pengadaan Mebel	Diskominfo	Terpenuhinya kebutuhan mebeleur kantor	0	0	0
		- Sub Kegiatan : Pengadaan peralatan dan	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	unit	1	7.366.600,-	Pengadaan sarana dan prasarana	Diskominfo	Terpenuhinya kebutuhan	1	7.366.600,-	

		mesin lainnya				pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		perlengkapan gedung kantor				
		<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah</b>	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta layanan umum kantor	laporan	34	1.027.155.000,-	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah</b>	Diskominfo	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta layanan umum kantor	34	1.027.155.000,-	Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sdh disesuaikan dg kebutuhan yg diperlukan.
		- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa surat Menyurat	Tersedianya perangko, meterai dan jasa pos lainnya untuk kelancaran tugas kedinasan	laporan	10	5.625.000,-	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Diskominfo	Tersedianya perangko, meterai dan jasa pos lainnya untuk kelancaran tugas kedinasan	10	5.625.000,-	
		- Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	12	859.936.000,-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Diskominfo	Terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	12	859.936.000,-	
		- Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya honorarium petugas kebersihan kantor dan peralatan/ perlengkapan kebersihan kantor	laporan	12	161.594.000,-	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Diskominfo	Tersedianya honorarium petugas kebersihan kantor dan peralatan/ perlengkapan kebersihan kantor	12	161.594.000,-	
		<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya keamanan, kelancaran fasilitas transportasi dan gedung dalam proses kinerja PD	unit	42	244.633.400,-	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah</b>	Diskominfo	Meningkatnya keamanan, kelancaran fasilitas transportasi dan gedung dalam proses kinerja PD	42	244.633.400,-	Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sdh disesuaikan dg kebutuhan yg diperlukan.
		- Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas, tersedianya dana untuk perijinan/pajak kendaraan dinas	unit	20	140.000.000,-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Diskominfo	Terpeliharanya kendaraan dinas, tersedianya dana untuk perijinan/pajak kendaraan dinas	20	140.000.000,-	
		- Sub Kegiatan : Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	unit	20	23.633.400,-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Diskominfo	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	20	23.633.400,-	
		- Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	unit	1	65.000.000,-	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Diskominfo	Terpeliharanya gedung kantor	1	65.000.000,-	
		- Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	unit	1	16.000.000,-	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana	Diskominfo	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1	16.000.000,-	



		pendukung gedung kantor atau bagunan lainnya					pendukung gedung kantor atau bagunan lainnya					
		<b>Kegiatan : Penataan Organisasi</b>	Meningkatnya kinerja SDM dan reformasi birokrasi				<b>Kegiatan : Penataan Organisasi</b>	Diskominfo	Meningkatnya kinerja SDM dan reformasi birokrasi			
		Sub Kegiatan : Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tercapainya peningkatan kinerja SDM dan reformasi birokrasi	Dokumen	1	25.000.000,-	Sub Kegiatan : Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	Diskominfo	Tercapainya peningkatan kinerja SDM dan reformasi birokrasi		25.000.000,-	
		<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	Meningkatnya pengembangan komunikasi,informasi dan media serta kerjasamainformasi dengan mass media	Dokumen layanan	36 12	1.146.648.650,-	<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>	Diskominfo	Meningkatnya pengembangan komunikasi,informasi dan media serta kerjasamainformasi dengan mass media	36 dok 12 laynn	1.146.648.650,-	
		<b>Kegiatan : Pengelolaan informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan Kab. Batang	dokumen	12	1.146.648.650,-	<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>	Diskominfo	Meningkatnya pengembangan komunikasi,informasi dan media serta kerjasamainformasi dengan mass media	12	1.146.648.650,-	Sesuai dengan rancangan awal RKPd, target capaian sdh disesuaikan dg kebutuhan yg diperlukan.
		- Sub Kegiatan : Pengelolaan media komunikasi publik	Terlaksananya pengelolaan dan penyajian informasi melalui media komunikasi publik	dokumen	12	406.380.500,-	Pengelolaan media komunikasi publik	Diskominfo	Terlaksananya pengelolaan dan penyajian informasi melalui media komunikasi publik	12	406.380.500,-	
		- Sub Kegiatan : Pelayanan informasi publik	Terlaksananya pelayanan informasi publik	dokumen	12	65.000.000,-	Pelayanan informasi publik	Diskominfo	Terlaksananya pelayanan informasi publik	12	65.000.000,-	
		- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Terselenggaranya kegiatan kehumasan dan kemitraan komunitas	dokumen	12	50.000.000,-	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Diskominfo	Terselenggaranya kegiatan kehumasan dan kemitraan komunitas	12	50.000.000,-	
		- Sub Kegiatan : Layanan hubungan media	Tersebaranya berita Kabupaten Batang	layanan	12	625.268.150,-	Layanan hubungan media	Diskominfo	Tersebaranya berita Kabupaten Batang	12	625.268.150,-	
		<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	Meningkatnya infrastruktur dan tata kelola TIK daerah	persen	70	1.055.000.000,-	<b>Program Aplikasi Informatika</b>	Diskominfo	Meningkatnya infrastruktur dan tata kelola TIK daerah	100	1.700.000.000,-	
		<b>Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terpenuhinya infrastruktur jaringan TIK	persen	100	125.000.000,-	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Diskominfo	Terpenuhinya infrastruktur jaringan TIK	100	550.000.000,-	
		- Sub Kegiatan :	Jumlah titik jaringan	unit	32	125.000.000,-	Penyelenggaraan	Diskominfo	Jumlah titik jaringan	32	550.000.000,-	

		Penyelenggaraan system jaringan intra pemerintah daerah				system jaringan intra pemerintah daerah						
		<b>Kegiatan : Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tercapainya target capaian SPBE dan smart city	persen	100	930.000.000,-	<b>Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Diskominfo	Tercapainya target capaian SPBE dan smart city	100	1.150.000.000,-	Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sdh disesuaikan dg kebutuhan yg diperlukan.
		- Sub Kegiatan : Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik	tercapainya indeks SPBE Kabupaten Batang	unit	1	120.000.000,-	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik	Diskominfo	tercapainya indeks SPBE Kabupaten Batang	1	200.000.000,-	
		- Sub Kegiatan: Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	dokumen	1	810.000.000,-	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas	Diskominfo	Indeks smart city kabupaten Jumlah desa yg menerapkan smart village	1	950.000.000,-	
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				189.480.000,-					189.480.000,-	
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Meningkatnya pengembangan data statistic sektoral dan keterbukaan informasi	persen	100	189.480.000,-	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Diskominfo	Meningkatnya pengembangan data statistic sektoral dan keterbukaan informasi	100	189.480.000,-	
		<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Kabupaten/ Kota</b>	Terpenuhinya pemanfaatan data dan statistic sektoral	persen	100	189.480.000,-	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Kabupaten/kota</b>		Terpenuhinya pemanfaatan data dan statistic sektoral	100	189.480.000,-	Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sdh disesuaikan dg kebutuhan yg diperlukan.
		- Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistic sektoral	Tersedianya data statistic daerah	dokumen	12	112.137.950,-	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistic sektoral	Diskominfo	Tersedianya data statistic daerah	12	112.137.950,-	
		- Sub Kegiatan : Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	orang	2	24.894.050,-	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah	Diskominfo	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah	2	24.894.050,-	

	terintegrasi					yang terintegrasi		yang terintegrasi			
	- Sub Kegiatan : Membangun meta data statistic sektoral	Tersedia dan tersusunnya metadata kegiatan statistic di Kab. Batang	dokume n	10	27.448.000,-	Membangun meta data statistic sektoral	Diskominfo	Tersedia dan tersusunnya metadata kegiatan statistic di Kab. Batang	10	27.448.000,-	
	- Sub Kegiatan : Pengembangan Infra struktur	Tersedianya infrastruktur penunjang kegiatan statistik	unit	1	25.000.000,-	Pengembangan Infra struktur	Diskominfo	Tersedianya infrastruktur penunjang kegiatan statistik	1	25.000.000,-	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				109.000.000,-					109.000.000,-	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Terpenuhinya standar keamanan informasi dan persandian daerah	persen	109.000. 000,-	109.000.000,-	<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Diskominfo	Terpenuhinya standar keamanan informasi dan persandian daerah	100%	109.000.000,-	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Sistem Elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya	persen	100	109.000.000,-	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Sistem Elektronik yang dilakukan pengamana n setiap tahunnya	persen	100	109.000.000,-	Sesuai dengan rancangan awal RKPD, target capaian sdh disesuaikan dg kebutuhan yg diperlukan.
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	laporan	12	109.000.000,-	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/k ota berbasis elektronik dan non elektronik	laporan	12	109.000.000,-	

## BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika diarahkan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mendukung kebijakan nasional tersebut maka sesuai dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

- terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
- tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
- terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
- terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pada Urusan Komunikasi dan Informatika Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah telah yang tiap tahunnya dievaluasi oleh oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan

kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 59 tahun 2020 bahwa lingkup pelaksanaan SPBE ada pada 4 domain. Domain tersebut antara lain domain kebijakan (aspek kebijakan tata kelola dan aspek kebijakan pelayanan), domain tata kelola (aspek kelembagaan, aspek strategi dan perencanaan dan aspek TIK) dan domain layanan (aspek administrasi pemerintah dan aspek pelayanan publik). Pemanfaatan TIK dalam Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi infrastruktur jaringan, aplikasi dan keamanan informasi. Untuk meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan keterpaduan antar stakeholder dalam mewujudkan sebuah tata kelola yang yang efektif.

Dinas Komunikasi dan Informatika membangun interaksi Pemda dengan masyarakat untuk penyerapan aspirasi publik melalui email, telepon, media sosial, dan aplikasi Batang Smart City serta aplikasi aduan E-Lapor Bupati. E-Lapor Bupati juga telah diintegrasikan dengan Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan *Whistle Blowing System* (WBS).

Untuk menunjang kelancaran dalam penerapan teknologi Informasi di Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2024 jaringan yang terkoneksi dengan jaringan Fiber Optik sebanyak 130 titik.

Tugas dan fungsi Diskominfo dalam penyebaran informasi di wilayah Kabupaten Batang mempunyai tantangan tersendiri. Belum semua desa terjangkau sarana informasi yang memadai karena terkendala oleh wilayah yang kebanyakan berupa pegunungan sehingga ada terdapat wilayah yang blank spot. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang dalam membangun akses komunikasi dan informasi ke desa-desa dilakukan dengan memberdayakan Lembaga Komunikasi Sosial yang diantaranya melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan group seni Pertunjukan Rakyat FK METRA (Forum Komunikasi Media Tradisional)). Keberadaan KIM dan kelompok seni FK METRA adalah sebagai simpul komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang berperan sebagai penyebar (*disseminator*) informasi kepada masyarakat. Selain itu penyebaran informasi dapat melalui media sosial dan website dikarenakan masyarakat akan lebih mudah menerima dan menyerap informasi yang disampaikan. Beberapa komunitas netizen berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang dalam menangkal berita-berita hoax tentang Pemerintah Kabupaten Batang. Hal ini sangat efektif dalam menetralsir berita-berita hoax di masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan pembangunan urusan komunikasi dan informatika yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang adalah meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, hal ini sesuai dengan Tujuan yang ke 2 (dua) Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2023-2026 yaitu “ Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel “ dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang masuk dalam tugas pencapaian sasaran Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 khususnya pada Sasaran ke 2 yaitu “ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemerintahan yang Cerdas, Cepat dan Responsif (Agile Governnnance).

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan Program dan Kegiatan Diskominfo Kabupaten Batang tahun 2023-2026.. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama empat tahun. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang, antara lain adalah :

> Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang

I. Mewujudkan kualitas pelayanan bidang komunikasi dan informatika yang efektif, transparan dan partisipatif

Dengan Indikator :  
Indeks Kepuasan Masyarakat  
Formula :

Dengan sasaran strategisnya :

- 1) Meningkatnya penyebar luasan informasi dan komunikasi publik  
Dengan Indikator :  
Persentase informasi dan komunikasi publik yang bisa diakses lewat media komunikasi
- 2) Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah  
Dengan Indikator :  
Persentase pemanfaatan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
- 3) Meningkatnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan daerah.  
Dengan Indikator :

**II. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik**

Dengan Indikator :  
Indeks SPBE

**Dengan sasaran strategisnya :**

- 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik berbasis smart city.  
Dengan Indikator :  
Indeks Smart City

**III. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Diskominfo**

Dengan Indikator : Nilai Sakip

Dengan sasaran strategisnya : Nilai Sakip Diskominfo



Perwujudan dari penguatan kebijakan ketatalaksanaan untuk mendorong proses birokrasi yang sederhana, cepat dan terintegrasi serta membuka ruang partisipasi publik adalah dengan mendorong implementasi teknologi untuk melahirkan kreatifitas dan inovasi dalam membantu proses penyelesaian masalah prioritas dan sektor unggulan daerah, berbasis data yang terintegrasi dan kolaboratif antar wilayah untuk mengakselerasi terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Batang yang lebih sejahtera, sehat, nyaman dan aman. Konsep ini kemudian tertuang dalam aplikasi Batang Smart City. Lewat aplikasi ini masyarakat luas dapat mengakses kebutuhan yang diperlukan mulai dari kuliner, tempat wisata, pusat perbelanjaan, layanan kesehatan dan lain sebagainya.

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3-3 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang

Kode	Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2							7.360.892.590,-	APBD	Tahun 2024 diprediksikan alokasi dana mengalami peningkatan		8.506.733.584,-
2	16						6.933.754.640,-	APBD			8.112.095.634,-
2	16	01			Diskomin fo	100 %	4.834.510.640,-	APBD		100%	5.265.446.984,-
2	16	01	2.01		Diskominfo	100% (7 lap)	10.000.000,-	APBD	Perencanaan sdh Sesuai dengan rancangan awal RKPD, dengan target capaian sdh disesuaikan dg kebutuhan yg diperlukan.	100% (7 lap)	10.000.000
2	16	01	2.01	06	Diskominfo	100% (7 lap)	10.000.000,-	APBD		100% (7 lap)	10.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	16	01	2.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Diskominfo	100%	3.017.011.640,-	APBD	Perencanaan sdh Sesuai dengan rancangan awal RKPD, dengan target capaian sdh d disesuaikan dg kebutuhan yg diperlukan.	100%	3.261.938.984,-
2	16	01	2.02	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Diskominfo	100% (27 org/bln)	2.957.672.980,-	APBD	-sda-	100% (27 org/bln)	3.201.938.984,-
2	16	01	2.02	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Diskominfo	100% (1200 dok)	59.338.660,-	APBD	-sda-	100% (1200 dok)	60.000.000,-
2	16	01	2.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Diskominfo	100% (1 paket)	242.087.300,-	APBD	Perencanaan sdh Sesuai dengan rancangan awal RKPD, dengan target capaian sdh d disesuaikan dg kebutuhan yg diperlukan.	100% (1 paket)	252.508.000,-
2	16	01	2.06	01	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Diskominfo	100%	12.152.000,-	APBD	-sda-	100%	12.500.000
2	16	01	2.06	02	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Diskominfo	100%	39.349.800,-	APBD	-sda-	100%	39.400.000
2	16	01	2.06	04	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman untuk kantor	Diskominfo	100%	70.008.000,-	APBD	-sda-	100%	70.008.000,-

[illegible]

[illegible]

	Kode				Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	16	0	2.0		<b>Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat, jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik serta layanan umum kantor	Diskominfo	34 laporan	1.137.045.100,-	APBD	Perencanaan sdh Sesuai dengan rancangan awal RKPD, dengan target capaian sdh disesuaikan dg kebutuhan yg diperlukan.	40 laporan	1.306.000.000,-
2	16	0	2.0	01	<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa surat Menyurat	Tersedianya peranko, meterai dan jasa pos lainnya untuk kelancaran tugas kedinasan	Diskominfo	10 laporan	5.625.000,-	APBD	-sda-	12 laporan	6.000.000,-
2	16	0	2.0	02	<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	Diskominfo	12 layanan	943.936.000,-	APBD	-sda-	12 layanan	1.100.000.000,-
2	16	0	2.0	04	<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya honorarium petugas kebersihan kantor dan peralatan/ perlengkapan kebersihan kantor	Diskominfo	12 laporan	187.484.100,-	APBD	-sda-	12 laporan	200.000.000,-
2	16	0	2.0		<b>Kegiatan :</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya keamanan, kelancaran fasilitas transportasi dan gedung dalam proses kinerja PD	Diskominfo	100%	196.000.000,-	APBD	Perencanaan sdh Sesuai dengan rancangan awal RKPD, dengan target capaian sdh disesuaikan dg kebutuhan yg diperlukan.	100%	355.000.000,-
2	16	0	2.0	01	<b>Sub Kegiatan :</b> Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas, tersedianya dana untuk perijinan/pajak kendaraan dinas	Diskominfo	16 unit	150.000.000,-	APBD	-sda-	16 unit	180.000.000,-

	Kode				Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	16	01	2.09	06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharaanya peralatan gedung kantor	Diskominfo	100% (20 unit)	30.000.000,-	APBD	-sda-	100% (20 unit)	50.000.000
2	16	01	2.09	09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	Diskominfo	3 unit	0	APBD	-sda-	3 unit	100.000.000
2	16	01	2.09	11	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Diskominfo	100% (1 unit)	16.000.000,-	APBD	-sda-	100% (2 unit)	25.000.000,-
2	16	01	2.13		<b>Kegiatan: Penataan Organisasi</b>		Diskominfo	1 dokumen	25.000.000	APBD	-sda-	1 dokumen	25.000.000
2	16	01	2.13	0003	<b>Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Diskominfo	1 dokumen	25.000.000	APBD	-sda-	1 dokumen	25.000.000
2	16	02			<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	Meningkatnya pengembangan komunikasi,informasi dan media serta kerjasamainformasi dengan mass media	Diskominfo	100% (36 dok dan 12 layanan)	1.244.244.000,-	APBD		<b>100% (12 dok)</b>	<b>1.146.648.650,-</b>
2	16	02	2.01		<b>Kegiatan : Pengelolaan informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan Kab. Batang</b>	<b>Diskominfo</b>	<b>12 dok</b>	1.244.244.000,-	APBD	<b>Perencanaan sdh Sesuai dengan rancangan awal RKPD, dengan target capaian sdh disesuaikan dg kebutuhan yg diperlukan.</b>	<b>12 dok</b>	<b>1.146.648.650,-</b>
2	16	02	2.01	05	<b>Sub Kegiatan :</b> Pengelolaan media komunikasi publik	Terlaksananya pengelolaan dan penyajian informasi melalui media komunikasi publik	Diskominfo	12 dok	329.244.000,-	APBD	-sda-	12 dok	308.550.000,-
2	16	02	2.01	06	<b>Sub Kegiatan :</b> Pelayanan informasi publik	Terlaksananya pelayanan informasi publik	Diskominfo	12 dok	65.000.000,-	APBD	-sda-	12 dok	65.000.000,-
2	16	02	2.01	07	<b>Sub Kegiatan :</b> Layanan hubungan media	Tersebarnya berita Kabupaten Batang	Diskominfo	12 layanan	800.000.000,-	APBD	-sda-	12 layanan	723.098.000,-
2	16	02	2.01	12	<b>Sub Kegiatan :</b> Penyelenggaraan hubungan	Terselenggaranya kegiatan kehumasan dan kemitraan	Diskominfo	12 dok	50.000.000,-	APBD	-sda-	12 dok	50.000.000,-

[illegible]



	Kode				Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	16	03			<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	Persentase Jumlah Layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Diskominfo	70%	1.055.000.000,-	APBD		70%	1.700.000.000,-
2	16	03	2.01		<b>Kegiatan :</b> <b>Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Ketersediaan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah Daerah</b>	Diskominfo	<b>100%</b>	<b>125.000.000,-</b>	APBD	<b>Perencanaan sdh Sesuai dengan rancangan awal RKPD, dengan target capaian sdh disesuaikan dg kebutuhan yg diperlukan.</b>	<b>100%</b>	550.000.000,-
2	16	03	2.01	03	<b>Sub Kegiatan :</b> Penyelenggaraan system jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah pengelolaan interkoneksi jaringan intra Pemerintah Daerah (OPD)	Diskominfo	100%	125.000.000,-	APBD	-sda-	100%	550.000.000,-
2	16	03	2.02		<b>Kegiatan :</b> <b>Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase jumlah layanan yang diselenggarakan secara online</b>	Diskominfo	<b>100%</b>	<b>930.000.000,-</b>	APBD	<b>Perencanaan sdh Sesuai dengan rancangan awal RKPD, dengan target capaian sdh disesuaikan dg kebutuhan yg diperlukan.</b>	<b>100%</b>	<b>1.150.000.000,-</b>
2	16	03	2.02	07	<b>Sub Kegiatan :</b> Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik	tercapainya indeks SPBE Kabupaten Batang	Diskominfo	1 unit	120.000.000,-	APBD	-sda-	1 unit	200.000.000,-
2	16	03	2.02	09	<b>Sub Kegiatan:</b> Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	Diskominfo	1 dok	810.000.000,-	APBD	-sda-	1 dok	950.000.000,-

	Kode				Urusan/ BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		Diskominfo		327.137.950,-				244.637.950,-
					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Meningkatnya pengembangan data statistic sektoral dan keterbukaan informasi	Diskominfo	100%	327.137.950,-,-			100%	244.637.950,-
					Kegiatan : Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Diskominfo	100%	327.137.950,-	APBD	Perencanaan sdh Sesuai dengan rancangan awal RKPD, dengan target capaian sdh disesuaikan dg kebutuhan yg diperlukan.	100%	244.637.950,-
					Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan,pengolahan, analisis dan diseminasi data statistic sektoral	Tersedianya data statistic daerah	Diskominfo	12 dok	102.137.950,-	APBD	-sda-	12 dok	102.137.950,-
					Sub Kegiatan : Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Diskominfo	2 org	100.000.000,-	APBD	-sda-	2 org	67.500.000,-
					Sub Kegiatan : Membangun meta data statistic sektoral	Tersedia dan tersusunnya metadata kegiatan statistic di Kab. Batang	Diskominfo	10 dok	25.000.000,-	APBD	-sda-	10 dok	25.000.000,-
					Sub Kegiatan : Pengembangan Infra struktur	Tersedianya infrastruktur penunjang kegiatan statistik	Diskominfo	1 unit	100.000.000,-	APBD	-sda-	1 unit	50.000.000,-
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Terpenuhinya standar keamanan informasi dan persandian daerah	Diskominfo	100%	100.000.000,-	APBD	-sda-	100%	105.000.000,-
					Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Sistem Elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya	Diskominfo	100%	100.000.000,-	APBD	-sda-	100%	105.000.000,-
					Sub Kegiatan : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Diskominfo	12 laporan	100.000.000,-	APBD	-sda-	12 laporan	105.000.000,-



## BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang pada tahun 2023 mempunyai lima (5) program, sebelas (11) kegiatan dan dua puluh sembilan (29) sub kegiatan. Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dari tabel 4-1 berikut ini.

**Tabel 4-1**

**Program dan Kegiatan**

**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Tahun 2024**

No.	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN	TARGET PROGRAM
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. <b>Indikator :</b> <i>Persentase capaian kinerja program Diskominfo</i>  <b>Formula :</b>  <i>Nilai Sakip Diskominfo</i>	1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. <b>Indikator :</b> Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah <b>Formula :</b> ( Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun / jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang seharusnya tersusun tahun berjalan ) x 100%	1.	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD <b>Indikator :</b> Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja, Laporan KU dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang tersusun. <b>Formula :</b> Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang tersusun tahun berjalan	10.000.000,-	100%  (Nilai Sakip BB)
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. <b>Indikator :</b>  Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah. <b>Formula :</b>  (Jumlah bulan terprosesnya usulan Gaji , Tunjangan ASN DISKOMINFO dan penyusunan laporan keuangan : Jumlah bulan rencana penyediaan Gaji, tunjangan ASN dan penyusunan laporan keuangan tahun berjalan) x 100%	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN <b>Indikator :</b> Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN <b>Formula :</b> (jumlah ASN DISKOMINFO yang terpenuhi Gaji dan Tunjangannya : Jumlah ASN DISKOMINFO tahun berjalan) x 100%	2.957.672.980,-	100%
				2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. <b>Indikator:</b> Jumlah dokumen hasil pengelolaan keuangan SKPD <b>Formula :</b> Jumlah dokumen hasil pengelolaan keuangan SKPD Tahun berjalan	59.338.660,-	100%

		3.	<p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p><b><u>Indikator :</u></b></p> <p>Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah</p> <p><b><u>Formula :</u></b></p> <p>(Jumlah bulan terprosesnya administrasi umum internal DISKOMINFO : Jumlah bulan rencana penyediaan kebutuhan administrasi umum internal DISKOMINFO tahun berjalan) x 100%</p>	<p>1.</p> <p>Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor</p> <p><b><u>Indikator :</u></b></p> <p>Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</p> <p><b><u>Formula :</u></b></p> <p>Realisasi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor / Jumlah Kebutuhan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yg hrs tersedia X 100%</p>	12.152.000,-	100%
				<p>2.</p> <p>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p><b><u>Indikator :</u></b></p> <p>Realisasi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor / Jumlah Kebutuhan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yg hrs tersedia X 100%</p> <p><b><u>Formula :</u></b></p> <p>Realisasi peralatan dan perlengkapan kantor / Jumlah Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor X 100%</p>	39.349.800,-	100%
				<p>3.</p> <p>Penyediaan bahan logistic kantor</p> <p><b><u>Indikator :</u></b></p> <p>Persentase terpenuhinya kebutuhan jamuan makan dan minum</p> <p><b><u>Formula :</u></b></p> <p>(Jumlah jamuan makan dan minum yang tersedia : Jumlah usulan kebutuhan jamuan makan dan minum) x 100%</p>	70.008.000,-	100%
				<p>4.</p> <p>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</p> <p><b><u>Indikator :</u></b></p> <p>Jumlah Blangko cetakan dan fotocopy yang terproses</p> <p><b><u>Formula :</u></b></p>	19.577.500,-	100%

			Jumlah Blangko cetakan dan fotocopy yang terproses tahun berjalan			
		5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan <b>Indikator :</b> Persentase terpenuhinya kebutuhan bacaan dan peraturan perundang-undangan <b>Formula :</b> (jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terbeli : Jumlah usulan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan ) x 100%	6.000.000,-	100%	
		6.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD <b>Indikator :</b> Persentase terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah <b>Formula :</b> (Jumlah bulan terlaksananya rakor dan konsultasi ke luar daerah : Jumlah bulan usulan kebutuhan rakor dan konsultasi ke luar daerah) x 100%	95.000.000,-	100%	
	4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah. <b>Indikator:</b> Tersedianya sarpras penunjang kinerja aparatur OPD <b>Formula :</b> Jumlah sarpras yang terbeli : Jumlah kebutuhan sarpras yang harus terbeli x 100%	1.	Pengadaan meubeler <b>Indikator :</b> Terpenuhinya kebutuhan mebeler sebagai penunjang kinerja ASN <b>Formula :</b> Realisasi penyediaan mebeler / Jumlah kebutuhan mebeler x 100%	7.366.600,-	100%
		5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <b>Indikator:</b> cakupan layanan operasional kantor	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat <b>Indikator :</b> Jumlah Perlengkapan Surat Menyurat yang terbeli <b>Formula :</b>	5.625.000,-

		<b>Formula :</b> (jumlah bulan layanan operasional kantor yang terpenuhi : jumlah bulan rencana penyediaan layanan operasional kantor ASN Diskominfo ) x 100%	Jumlah Perlengkapan Surat Menyurat yang terbeli tahun berjalan		
			2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik <b>Indikator :</b> Persentase terbayarnya tagihan telepon, listrik, air dan internet <b>Formula :</b> (jumlah bulan terbayarnya tagihan telepon, listrik, air, internet : Jumlah bulan usulan kebutuhan pembayaran tagihan telepon, listrik, air, internet tahun berjalan ) x 100%	943.936.000,-	100%
			3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor <b>Indikator :</b> Persentase Lancarnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <b>Formula :</b> (jumlah bulan terlaksananya jasa Kebersihan kantor, jasa tenaga administrasi dan Jasa pemeliharaan kesehatan PNS : Jumlah bulan usulan kebutuhan jasa Kebersihan kantor, jasa tenaga administrasi dan Jasa pemeliharaan kesehatan PNS tahun berjalan ) x 100%	187.484.100,-	100%
	6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <b>Indikator :</b> Tersedianya sarpras penunjang kinerja aparatur OPD <b>Formula :</b> Jumlah sarpras yang terbeli : Jumlah kebutuhan sarpras yang harus terbeli x 100%	1. Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan <b>Indikator :</b> Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara tahun berjalan <b>Formula :</b> Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara tahun berjalan	150.000.000,-	100%
			2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya <b>Indikator :</b> Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya <b>Formula :</b>	30.000.000,-	100%

				Realisasi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya / Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang harus dipelihara x 100%		
			3.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya <b>Indikator :</b> Terpeliharanya gedung kantor <b>Formula :</b> Jumlah Gedung kantor yang harus dipelihara	0	0
			4.	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya <b>Indikator :</b> Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor <b>Formula :</b> Realisasi pemeliharaan/rehabilitasi sarpras pendukung ged.kntr atau bangunan lainnya : Jumlah sarpras yang membutuhkan pemeliharaan x 100%	16.000.000,-	100%
	7.	Penataan Organisasi	1	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	25.000.000,-	25.000.000,-.

2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik <b>Indikator :</b> <i>Persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota</i> <b>Formula :</b> <i>Jumlah informasi yang diakses publik / jumlah penyebaran informasi x 100%</i>	Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota <b>Indikator :</b> Jumlah informasi publik pemerintah Daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat <b>Formula :</b> Jumlah informasi publik pemerintah Daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat pertahun	1.	Pengelolaan media komunikasi public <b>Indikator:</b> Jumlah media komunikasi publik yang dikelola <b>Formula :</b> Jumlah Media komunikasi yang dikelola pertahun	329.244.000,-	100%
			2.	Pelayanan Informasi Publik <b>Indikator :</b> Jumlah Badan Publik Kategori Informatif dan Menuju Informatif <b>Formula :</b> Jumlah BP Informatif dan Menuju Informatif tahun berjalan	65.000.000,-	100%



				3.	Layanan Hubungan Media <b>Indikator :</b> Jumlah tersebarnya berita pembangunan dan pemerintahan kabupaten Batang  <b>Formula :</b> jumlah berita yang diinformasikan lewat media	800.000.000,-	100%
				4.	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas <b>Indikator :</b> Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah <b>Formula:</b> Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah	50.000.000,-	100%
3.	Program Aplikasi Informatika <b>Indikator :</b> <b>Persentase</b> Jumlah Layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi  <b>Formula:</b> Jml layanan yg diselenggarakan secara online dan terintegrasi / jumlah layanan publik x 100%	1	Pengelolaan Nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota  <b>Indikator:</b> Ketersediaan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah Daerah  <b>Formula :</b> Jumlah interkoneksi yang aktif dibagi dengan jumlah seluruh interkoneksi jaringan intra pemerintah daerah	1.	Penyelenggaraan system jaringan intra Pemerintah daerah <b>Indikator :</b> Jumlah pengelolaan interkoneksi jaringan intra Pemerintah Daerah (OPD)  <b>Formula :</b> jumlah interkoneksi jaringan intra pemerintah (OPD) yang dikelola	125.000.000,-	100%
		2	Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota  <b>Indikator :</b> Persentase jumlah layanan yang	1.	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik  <b>Indikator :</b> Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	120.000.000,-	100%

			diselenggarakan secara online <b>Formula :</b> jml layanan yg diselenggarakan secara online dibagi jumlah layanan publik		<b>Formula :</b> Jumlah Aplikasi		
				2.	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas <b>Indikator :</b> Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City <b>Formula :</b> Dokumen Evaluasi Smart City	810.000.000,-	100%
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral <b>Indikator :</b> Persentase ketersediaan data statistik sektoral <b>Formula :</b> Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi / Jumlah data statistik sektoral yang terkumpul x 100%	1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota <b>Indikator:</b> Terpenuhinya pemanfaatan data dan statistik sektoral <b>Formula :</b> Jumlah data statistik sektoral yang terkumpul dalam satu tahun	1.	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistic sektoral Indikator : 2. Jumlah Buku “Kabupaten Batang Dalam Angka”. 3. Jumlah Data yang terupdate dalam Portal Open Data. Formula : 1. Jumlah buku yang dicetak 2. Jumlah data yang sudah terupload dalam portal open data	102.137.950,-	100%
				2.	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistic daerah yang terintegrasi Indikator : 1. Jumlah Sosialisasi/Workshop dan pendampingan tentang pengelolaan Data Statistik Sektoral dan Geospasial 2. Jumlah Data Geospasial yang terupdate dalam Website Geoportal Formula : 1. Jumlah sosialisasi/workshop yang diselenggarakan 2. Jumlah Data geospasial yang diupload ke sistem	100.000.000,-	100%
				3.	Membangun metadata statistic sektoral Indikator:	25.000.000,-	100%

				1. Jumlah Buku Metadata Statistik Sektoral 2. Metadata statistik sektoral Formula : 1. Jumlah buku yang dicetak 2. Jumlah daftar metadata statistik sektoral yang diperoleh dari perangkat daerah		
				4. Pengembangan Infrastruktur <b>Indikator:</b> Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Statistik Sektoral <b>Formula :</b> Sistem Informasi Data Statistik Sektoral	100.000.000,-	100%
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi <b>Indikator:</b> Capaian Sistem Elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya <b>Formula :</b> Jumlah Sistem Elektronik yang berhasil dilakukan pengamanan dibagi dengan jumlah seluruh sistem elektronik yang tersedia setiap tahun	1.	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota <b>Indikator :</b> Persentase Capaian Sistem Elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya <b>Formula :</b> Jumlah Sistem Elektronik yang berhasil dilakukan pengamanan dibagi dengan jumlah seluruh sistem elektronik yang tersedia setiap tahun	1. Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik <b>Indikator :</b> Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik <b>Formula :</b> Dokumen Laporan Sistem Elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahun	100.000.000,-	100%
			JUMLAH TOTAL :			7.360.892.590,-

## BAB 5 PENUTUP

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Tahun 2024 mencakup tiga bahasan yaitu :

a) Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Batang telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa hingga Musrenbang tingkat Kecamatan dan selanjutnya di proses dalam Forum SKPD tingkat Kabupaten hingga Pusat.

Selanjutnya Rencana Kerja ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023. Prioritas program/kegiatan/sub kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi juga diarahkan guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Namun demikian besaran pagu anggaran setiap program/kegiatan/sub kegiatan menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.

b) Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus di kedepankan.

c) Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan

mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan, mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.


Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan, dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan instrumen pengendalian tersebut, diharapkan terjadi kesesuaian antara perencanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam target capaian pada setiap tahapan dengan pelaksanaannya, dan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Komitmen, konsistensi, disiplin, kerja keras, semangat, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Dinas Komunikasi dan Informatika mutlak diperlukan untuk tercapainya sasaran Perangkat Daerah tahun 2024.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan sebagai landasan, pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

Batang, 19 Juni 2023

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BATANG**



**TRIOSSY JUNIARTO, S.IP, MM**  
NIP. 19690621 199003 1 003